



Krisis Ekologi dan Kritik terhadap Paradigma Antroposentris dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Nusa Tenggara Barat

Ecological Crisis and Critique of the Anthropocentric Paradigm in the Utilization of Natural Resources in West Nusa Tenggara

Subhan Bahtiar¹✉ | Muhammad Sarjan¹

¹✉ Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Indonesia

Abstrak

Krisis ekologi merupakan permasalahan global yang juga dirasakan di tingkat regional, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi lahan, serta penurunan kualitas sumber daya air menunjukkan adanya tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam pemanfaatan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Penulis bertujuan untuk menganalisis krisis ekologi di NTB dalam perspektif etika lingkungan serta mengkaji dampak paradigma antroposentris terhadap pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek konservasi telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma menuju pendekatan ekosentrisme dan Pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: krisis ekologi, antroposentrisme, DAS, konservasi lingkungan, Nusa Tenggara Barat

Abstract

Abstract

The ecological crisis is a global problem that is also felt at the regional level, including in West Nusa Tenggara (NTB) Province. Various forms of environmental damage such as deforestation, degradation of river watersheds (DAS), land conversion, and decline in the quality of water resources indicate great pressure on the carrying capacity of the environment. This problem cannot be separated from the anthropocentrism paradigm which places humans at the center in the use of natural resources without considering ecological balance. The author aims to analyze the ecological crisis in NTB from the perspective of environmental ethics and examine the impact of the anthropocentric paradigm on natural resource management. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that a development approach that is oriented towards the exploitation of natural resources without paying attention to conservation aspects has led to a decline in environmental quality. Therefore, a paradigm shift is needed towards an ecocentrism and sustainable development approach to maintain a balance between human needs and environmental sustainability.

Keywords: At least three and not more than six but not included in the title. All separated by a comma and only proper names with capital letter. Times new roman font, size 10, and single line spacing.

How to cite: Bahtiar, S. & Sarjan, M. (2026). Krisis Ekologi dan Kritik terhadap Paradigma Antroposentris dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*, 2(1), 12-17

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan sistem penyangga kehidupan yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia seperti air, udara, pangan, dan energi. Namun demikian, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. pertumbuhan populasi yang pesat dan peningkatan kebutuhan ekonomi sering kali menjadi alasan utama eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Manusia telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi peristiwa lingkungan dengan cara yang sangat bervariasi

dan signifikan (Pangesti et al., 2023). Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Menurut Nasution (2020), Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, mengakibatkan tekanan tambahan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur lingkungan. Salah satu penyebab utama krisis lingkungan adalah dominasi pendekatan pragmatis dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan pada keuntungan jangka pendek. Dalam konteks ini, pendekatan filosofis menjadi penting untuk mengkritisi cara manusia berinteraksi dengan alam serta mencari solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Filsafat, sebagai disiplin yang membahas hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan dunia, dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih mendalam dalam memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dimensi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip filosofis seperti etika, epistemologi, dan metafisika dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Pemikiran filosofis dapat membantu merumuskan prinsip etika lingkungan, mengidentifikasi nilai-nilai moral dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Hubungan antara manusia dan alam telah menjadi topik utama dalam berbagai perspektif filsafat sepanjang sejarah. Dalam tradisi filsafat Barat, pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta sering kali menjadi dasar bagi eksploitasi sumber daya alam.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, dan pertambangan. Namun pemanfaatan sumber daya tersebut belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Hal ini terlihat dari meningkatnya laju kerusakan hutan, menurunnya kualitas daerah aliran sungai, serta meningkatnya lahan kritis di beberapa wilayah. kerusakan daerah aliran sungai seperti DAS Renggung dan DAS Babak misalnya, menunjukkan adanya tekanan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas pertanian di daerah hulu. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya erosi, sedimentasi, serta gangguan terhadap sistem hidrologi DAS. Secara filosofis, kondisi ini berkaitan dengan paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem lingkungan. Alam dipandang hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga eksploitasi dianggap sebagai hal yang wajar selama memberikan manfaat ekonomi.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk krisis ekologi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat
2. Bagaimana pengaruh paradigma antroposentris terhadap pengelolaan sumber daya alam
3. Bagaimana upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis ekologi

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi bentuk krisis ekologi di Nusa Tenggara Barat.
2. Menganalisis pengaruh paradigma antroposentris dalam pemanfaatan sumber daya alam.
3. Mengkaji upaya konservasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan

2. Materials and Methods

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review) yang disusun menggunakan pedoman PRISMA. Penggunaan PRISMA bertujuan untuk memastikan transparansi, ketelitian, dan keandalan dalam proses pencarian, penyeleksian, dan sintesis literatur yang relevan dengan krisis lingkungan dan filsafat, serta dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran konseptual mengenai hubungan antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan di NTB secara komprehensif.

2.1 Strategi Pencarian Literatur

Pencarian data diperoleh dari berbagai sumber terindeks seperti basis data akademik (Google Scholar, DOAJ, Portal Garuda, dan Scopus). Pencarian literatur dilakukan secara komprehensif menggunakan kombinasi kata kunci spesifik (Boolean *AND* / *OR*), antara lain: ("krisis ekologi" *ATAU* "kerusakan lingkungan") *DAN* ("antroposentrisme" *ATAU* "etika lingkungan") *DAN* ("Nusa Tenggara Barat" *ATAU* "NTB") *DAN* ("konservasi" *ATAU* "pengelolaan sumber daya alam"). Pencarian dibatasi pada rentang waktu publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi isu dengan kondisi terkini, serta mencakup buku ilmiah, jurnal penelitian, dan laporan pemerintah

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk menjaga kualitas dan relevansi kajian, literatur yang ditemukan disaring berdasarkan kriteria yang ketat. Rincian kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam pencarian literatur dapat dilihat pada Tabel 1.

For new methods and protocols, provide a detailed description. For well-established methods, provide a brief summary and appropriate references.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Parameter	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis Literatur	Artikel berupa jurnal penelitian asli, buku ilmiah, atau laporan resmi dari pemerintah.	Artikel opini, tajuk rencana, skripsi/tesis yang belum dipublikasi, atau tulisan blog tanpa tinjauan sejawat (<i>peer-review</i>).
Topik Pembahasan	Membahas secara langsung isu kerusakan lingkungan di NTB, filsafat lingkungan, atau antroposentrisme	Penelitian yang konteks geografisnya di luar NTB dan tidak membahas aspek etika lingkungan secara universal.
Ketersediaan Akses	Menyediakan akses teks penuh (<i>full-text</i>).	Hanya tersedia abstrak atau teks penuh tidak dapat diakses secara legal.
Bahasa	Diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.	Diterbitkan dalam bahasa selain Indonesia atau Inggris.

2.3 Proses Seleksi Artikel

Tahapan seleksi artikel dilakukan sesuai dengan alur pedoman PRISMA, yang terdiri dari empat tahap utama:

1. Identifikasi (*Identification*): Mengumpulkan literatur terkait krisis ekologi dan etika lingkungan dari seluruh basis data yang telah ditentukan.
2. Penyaringan (*Screening*): Meninjau judul dan abstrak dari literatur yang terkumpul, serta mengeliminasi artikel yang terduplikasi (*duplicates*).
3. Kelayakan (*Eligibility*): Membaca teks penuh artikel yang lolos tahap penyaringan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
4. Disertakan (*Included*): Menetapkan literatur akhir yang paling relevan dan valid untuk diekstraksi dan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, artikel-artikel yang memenuhi kriteria kemudian diekstraksi. Daftar artikel yang diinklusi dan dianalisis dalam studi ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Artikel yang Diinklusi dalam Studi

Nama Penulis (Tahun)	Judul	Jurnal / Penerbit	Metode	Temuan Utama
Lora Santika & Muhammad Sarjan (2025)	Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan	Lambda Journal, Lembaga Bale Literasi, Universitas Mataram	Studi Kepustakaan	Integrasi nilai-nilai filsafat lingkungan dapat memperkuat kesadaran ekologis, mendorong kebijakan berkeadilan lingkungan, dan mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan
Anwar, & Supriadi (2025)	<i>Dampak Deforestasi terhadap Dinamika Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Bima: Studi Sosiologi Lingkungan di Wilayah Rawan Bencana</i>	Nusantara Hasana Journal	Kualitatif (Sosiologi Lingkungan)	Deforestasi menyebabkan penurunan produktivitas perikanan, peningkatan banjir dan erosi, serta meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir Bima.
Al Munir, M. I. (2023)	<i>Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme</i>	Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan	Studi Kepustakaan Kualitatif	Antroposentrisme dipandang sebagai penyebab berbagai krisis lingkungan, sedangkan biosentrisme dan ekosentrisme menawarkan paradigma etika yang lebih berkelanjutan.
Leopold, A. (1949)	<i>A Sand County Almanac</i>	Oxford University Press	Kajian Filosofis	Mengembangkan konsep <i>land ethic</i> yang menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis, bukan penguasa alam.
Carson, R. (1962)	<i>Silent Spring</i>	Houghton Mifflin	Kajian Lingkungan	Menunjukkan dampak negatif eksploitasi dan penggunaan bahan kimia terhadap ekosistem serta menjadi tonggak gerakan lingkungan modern.
Naess, A. (1973)	<i>The Shallow and the Deep Ecology Movement</i>	Inquiry Journal	Analisis Filosofis	Memperkenalkan konsep <i>deep ecology</i> yang menekankan nilai intrinsik seluruh makhluk hidup dan pentingnya perubahan paradigma manusia terhadap alam.
Keraf, A. S. (2010)	<i>Etika Lingkungan Hidup</i>	Kompas	Kajian Filosofis Normatif	Menjelaskan teori etika lingkungan serta kritik terhadap paradigma pembangunan yang eksploitatif

Soemarwoto, O. (2001)	<i>Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan</i>	Djambatan	Kajian Konseptual	terhadap sumber daya alam. Menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.
Asdak, C. (2014)	<i>Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</i>	Gajah Mada University Press	Kajian Teknis DAS	Kerusakan DAS umumnya dipicu perubahan tata guna lahan yang menyebabkan erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan.
Arsyad, S. (2010)	<i>Konservasi Tanah dan Air</i>	IPB Press	Kajian Konservasi	Konservasi tanah dan air melalui reboisasi, terasering, dan agroforestri mampu mengurangi degradasi lahan dan meningkatkan ketahanan lingkungan.

2.4 Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan literatur terkait krisis ekologi dan etika lingkungan
2. Mengelompokkan data berdasarkan tema permasalahan
3. Menganalisis keterkaitan antara paradigma antroposentris dan kerusakan lingkungan
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran konseptual mengenai hubungan antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan di NTB.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Krisis Ekologi di Nusa Tenggara Barat

3.1.1 Deforestasi dan degradasi hutan

Deforestasi dan degradasi hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan isu lingkungan serius yang berkaitan erat dengan konversi lahan menjadi pertanian, khususnya jagung, serta alih fungsi hutan menjadi kebun. Masalah ini menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Penanaman jagung di dalam kawasan hutan (di antaranya di wilayah Dompu) menjadi pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan di NTB. Alih Fungsi Lahan merupakan konversi tutupan hutan menjadi perkebunan yang didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat. Aktivitas Perambahan hutan, terutama di wilayah hutan produksi seperti Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan jalan dan aksesibilitas menuju kawasan hutan memudahkan konversi hutan menjadi lahan non-hutan. berdasarkan tren data Global Forest Watch hingga 2024, Nusa Tenggara Barat (NTB) kehilangan 100 kha tutupan pohon (2001-2024), dengan tren deforestasi yang berfokus pada hutan alam. Meskipun data spesifik netto 2026 belum dirilis, tren Auriga Nusantara menunjukkan potensi kenaikan signifikan, terutama di kawasan konsesi. (Global Forest Watch)

3.1.2 Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 menunjukkan tren degradasi yang signifikan akibat alih fungsi lahan masif di area hulu. Penyebab dominan kerusakan DAS, terutama di Pulau Sumbawa (Bima dan Dompu), adalah konversi hutan lindung di lereng gunung menjadi lahan budidaya jagung dan pemukiman seperti Kecamatan Soromandi (Bima): Sebagian besar hutan lindung di lereng Gunung Soromandi telah beralih fungsi. Faktor ekonomi dan lemahnya kontrol kelembagaan lokal terhadap tata guna lahan menjadi pendorong utama.

3.1.3 Alih fungsi lahan dan Lahan kritis

Alih fungsi lahan di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan, meskipun pemerintah pusat tengah berupaya memperketat perlindungan lahan sawah. terutama di wilayah seperti Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, di mana kawasan hutan dan gunung beralih fungsi menjadi lahan pertanian (padi/jagung). Selain itu, konversi sawah menjadi pemukiman dan kawasan industri terjadi masif, menyebabkan penyusutan lahan pertanian yang konsisten setiap tahunnya. Kondisi di Kota Mataram semakin kritis, dengan luas lahan pertanian yang terus menyusut dan hanya menyisakan sekitar 1.178 hektare pada awal 2026.

Meskipun ada aturan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD), terjadi pelanggaran di mana lahan sawah di zona LP2B dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah, seperti perumahan. Intervensi Pusat (Perpres 4/2026): Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 4/2026 yang menetapkan 8 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat, sebagai wilayah yang dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan perluasan permukiman menjadi faktor utama pendorong alih fungsi lahan di NTB ini tentu meningkatkan risiko bencana alam serta mengancam stabilitas produksi padi di NTB

3.2 Analisis Paradigma Antroposentris dalam Krisis Ekologi

Antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai. Dalam perspektif ini, alam hanya memiliki nilai instrumental (nilai guna) bagi manusia. Menurut Keraf (2010), antroposentris memenganggap manusia sebagai entitas yang paling penting dan yang memiliki hak atas eksploitasi alam. Pandangan ini telah menghasilkan banyak kebijakan yang berfokus pada pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka Panjang. Ulfani (2023) menyoroti bahwa pendekatan ini telah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan berkontribusi pada berbagai krisis ekologis seperti pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati. Meskipun antroposentrisme telah mendominasi pemikiran filosofis dan kebijakan lingkungan selama beberapa abad, kini semakin banyak ahli yang menyadari keterbatasannya dalam menangani krisis lingkungan yang kompleks dan multidimensional ini. Sebagai contoh, kebijakan lingkungan berbasis antroposentrisme sering kali memprioritaskan pembangunan ekonomi dan industri. Kebijakan ini sering kali merusak lingkungan dan memengaruhi keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. dalam konteks NTB, paradigma ini tercermin dalam Eksploitasi hutan tanpa rehabilitasi, pemanfaatan air tanpa pengelolaan berkelanjutan, pembangunan tanpa analisis dampak lingkungan yang optimal dan paradigma ini perlu dikritisi karena berpotensi menyebabkan krisis ekologis jangka panjang.

3.3 Dampak Krisis Ekologi terhadap Kehidupan Masyarakat

Kegagalan pengelolaan sumber daya alam sering kali berakar pada krisis etika lingkungan, yaitu ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Ketika terjadi dilema antara aspek keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi, keputusan yang diambil biasanya lebih berorientasi pada faktor ekonomi. Akibatnya, kondisi ini sering kali memicu munculnya konflik di masyarakat. Menurut data Walhi, pada tahun 2017 lima urutan teratas pemicu konflik di masyarakat adalah problem pencemaran, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan (Walhi 2018). Krisis ini muncul akibat paradigma antroposentrisme yang berlebihan, di mana alam dipandang sebagai objek yang hanya dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi dan industri tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi. Akibatnya, terjadi berbagai bentuk degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, overfishing, serta kepunahan spesies. Pengabaian prinsip ekosentrisme dan keadilan lingkungan menyebabkan eksploitasi yang tidak adil, di mana manfaat sumber daya hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat lokal yang bergantung pada alam justru mengalami dampak negatif seperti hilangnya mata pencaharian dan bencana ekologis. Penurunan produktivitas pertanian kerusakan tanah menyebabkan menurunnya hasil pertanian masyarakat. berkurangnya sumber air menyebabkan kesulitan akses air terutama saat musim kemarau. meningkatnya risiko bencana (banjir, longsor, kekeringan) dan prekonomian yaitu menurunnya kesejahteraan masyarakat.

3.4 Upaya Mengatasi Krisis Ekologi

Untuk mengatasi krisis ekologi diperlukan di Nusa Tenggara Barat yaitu perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih ramah lingkungan, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendekatan ekosentris, ekosentrisme memandang bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Model pengelolaan berbasis komunitas dan kearifan lokal memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai filsafat, terutama dalam etika lingkungan dan filsafat holistik. Model ini mencerminkan prinsip ekosentrisme, yang menekankan bahwa manusia bukan satu-satunya entitas yang berhak atas sumber daya alam, melainkan bagian dari sistem ekologis yang lebih besar. Menurut (Sarah & Hambali, 2023). Ekosentrisme mencakup seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, makhluk ekologis dengan objek abiotik lainnya terhubung satu sama lain. Konsep ini juga sejalan dengan filsafat deep ecology, yang menuntut kesadaran mendalam akan keterkaitan manusia dengan alam dan menolak eksploitasi berlebihan demi kepentingan ekonomi semata.
2. Kearifan lokal sebagai upaya konservasi yang tercantum pada Undang-undang nomor 32 pasal 1 ayat 30 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari” (Persada et al., 2018).
3. Konservasi tanah dan air, upaya konservasi dapat dilakukan melalui, Terasering, Reboisasi, Agroforestry Penanaman vegetasi penutup tanah
4. Pengelolaan DAS terpadu, pengelolaan DAS harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan melibatkan berbagai pihak.
5. Pendidikan lingkungan, kesadaran lingkungan perlu ditanamkan melalui pendidikan formal maupun non formal.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam hal ini Pemerintah perlu memperkuat kebijakan berbasis lingkungan melalui, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rehabilitasi lahan kritis Penguatan regulasi konservasi dan penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Krisis ekologi di Nusa Tenggara Barat merupakan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berbasis prinsip keberlanjutan. Paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan telah mendorong eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma menuju pendekatan

ekosentris yang menekankan keseimbangan ekosistem. Selain itu, upaya konservasi melalui pengelolaan DAS terpadu, rehabilitasi lahan, pendidikan lingkungan, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mengatasi krisis ekologi. Integrasi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat berperan penting dalam membangun kesadaran ekologis dan etika lingkungan dan Pandangan ekosentrisme dan biosentrisme menekankan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangannya. o Pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus menjadi agenda utama dalam kontestasi Pilkada. Tanpa masuk dalam visi-misi, isu lingkungan hanya akan menjadi isu pinggiran yang berujung pada kerusakan alam yang merugikan daerah tersebut secara berkelanjutan. Penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai belum maksimal, dengan permasalahan utama berupa degradasi hutan, lahan, dan lemahnya penindakan terhadap pelaku illegal logging. Refleksi akhir tahun 2025 bahkan menyoroti bahwa lingkungan hidup di NTB masih bermasalah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada universitas mataram atas kesempatanserta ilmu yang tentu sangat bermanfaat.

Pertimbangan Etika

Tidak perlu.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan PendanaanPenulis tidak menerima dukungan dana apapun.

Pernyataan Penggunaan AI Generatif

Penulis tidak menggunakan Generative AI dalam menulis artikel in.

References

- Ainia, D. K., & Lasiyo. (2024). Peran ecospirituality dalam etika lingkungan untuk menghadapi krisis perubahan iklim. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 9(2), 62–72. <https://doi.org/10.32923/sci.v9i2.4890>
- Al Munir, M. I. (2023). Corak paradigma etika lingkungan: Antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. *Jurnal Yaqzhan*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>
- Anwar, & Supriadi. (2025). Dampak deforestasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Bima: Studi sosiologi lingkungan di wilayah rawan bencana. *Nusantara Hasana Journal*.
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi tanah dan air* (Edisi Kedua). IPB Press.
- Asdak, C. (2014). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai* (Edisi Revisi). Gadjah Mada University Press.
- Carson, R. (1962). *Silent spring*. Houghton Mifflin.
- DesJardins, J. R. (2013). *Environmental ethics: An introduction to environmental philosophy* (5th ed.). Wadsworth.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Leopold, A. (1949). *A sand county almanac and sketches here and there*. Oxford University Press.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Prakoso, A. D., Firmansyah, K. F., Fikriyah, A. M., Fernando, G. J., & Rasidah, E. E. N. (2025). Implementasi etika lingkungan berbasis sila ketuhanan dan kemanusiaan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law*.
- Priyono, B. B., Purwantara, S., & Widyastuti. (2025). Biosentrisme dan ekosentrisme: Alternatif pandangan filsafat lingkungan terhadap krisis alam di era antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2).
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam: Kajian peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. *Lambda Journal*.
- Sara, B. M. Y. (2025). Menggugat hegemoni antroposentrisme melalui dekonstruksi hermeneutika ekologis. *Dekonstruksi*, 11(3), 118–126. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i03.319>
- Scerri, A. (2016). Deep ecology, the holistic critique of enlightenment dualism, and the irony of history. *Environmental Values*, 25(5), 549–572.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2018). *Catatan akhir tahun 2018: Tinjauan lingkungan hidup Indonesia*. WALHI.